



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 550 / 017/Dishub-PS/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 550/002/Kpts/Dishub-PS/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan terjadinya mutasi dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibuat Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam Lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958;
2. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/002/Kpts/Dishub-PS/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/017/Kpts/Dishub-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

KEDUA *Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :*

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan dengan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 01 Februari 2019



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN
 NOMOR
 * TANGGAL
 TENTANG

: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 : 550/017/Disnub-PS/2019
 : 01 Februari 2019
 : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA / NIP / GOL.	J A E A T A N	DITUNJUK SEBAGAI	PROJEK DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	VERAWATI, S.Sos 19760605 300801 2 029 PENATA (IIIc)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan. 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kejar Daerah 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 7. Penunjang Operasional perencanaan dan pelaporan SKPD
2	HASRIAL AMRI, S.STP 19760402 199511 1 001 Pembina Tk. (IV/b)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan
3	AFFANDI, S.Sos 19780928 300701 1 005 PENATA MUDA (IIIa)	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor. 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 7. Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubler 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1	2	3	4	5
4	RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003 PENATA MUDA (III/a)	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPTK	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos retribusi (TPR)</p> <p>Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas</p> <p>1. Pemeliharaan Rutin/berkala Penerangan Jalan Umum</p>
5	HERRY SUSILO, ST 19751001 200501 1 011 Penata Tk. I (III d)	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	PPTK	<p>Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>1. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)</p> <p>2. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)</p> <p>Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas</p> <p>1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum</p>
6	MARIALENA, SH 19640405 198808 2 001 Penata Tk. I (III d)	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	PPTK	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>1. Rehabilitasi/pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas</p>
7	NOFRIZON, S.Sos 18711196 200701 1 002 Penata Muda Tk. I (III/a)	Staf Seksi Pembangunan Prasarana		<p>Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas</p> <p>1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu RPPJ</p> <p>2. Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas</p>
8	AGUSTAR, SP 19630825 198711 1 001 Penata Tk. I (III d)	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	PPTK	<p>Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran</p> <p>1. Pelayanan Terminal dan Perparkiran</p>
9	ARLIM ARIFF 19660621 199003 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Lalu Lintas	PPTK	<p>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>1. Pengawasan dan Pengendalian LLAJ</p>
10	EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003 Penata (III/c)	Kepala Seksi Angkutan	PPTK	<p>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>1. Penunjang kegiatan WTN</p> <p>2. Pemilihan Sopir Teladan</p>

11	YUHERMAN, SH 19670316 1998603 1 003 Penata TK. VIII, d	Kepala Seksi Pengujian Sarana	PPTK	Program Peningkatan Kelalkan Pengoprasiaran Kendaraan Bermotor Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
12	ERMAN JUSA, SH 19730301 199403 1 003 Penata TK. I (III, d)	Kepala Seksi Keselamatan	PPTK	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Operasional dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut
13	YHOHANA RIZA, SH, M.SI 19650808 199303 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	PPTK	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembinaan dan Pengembangan Perhubungan Pelabuhan
14	DANOFFRIN 19621107 198503 1 005 Penata TK. I (III, d)	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	PPTK	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

